



PEMANFAATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Apando Ekardo¹, Desi Eka Putri², Tiara Indah Sari³, Ramadhani⁴, Nila Jahara⁵

^{1,2,3,4,5} STKIP Pesisir Selatan, Pesisir Selatan, Indonesia

E-Mail: apandoekardo@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v9i3.348>

Sections Info

Article history:

Submitted: 26 September 2024

Final Revised: 4 December 2024

Accepted: 12 December 2024

Published: 30 December 2024

Keywords:

Program Keluarga Harapan

Poverty

Utilization

Humanity



ABSTRAK

The Family Hope Program (PKH) is one of the poverty alleviation programs launched by the government in 2007 and has been ongoing until now. However, there are several problems in its implementation, including: fund distribution, the length of time for fund disbursement, and not all poor people receive PKH assistance. This study aims to see the contribution of the utilization of the Family Hope Program (PKH) assistance funds in poverty alleviation in Pesisir Selatan Regency; obstacles faced in the utilization of assistance funds (PKH); and strategies for utilizing assistance funds (PKH) to be more effective. This study uses a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and documentation studies. Informants were selected using purposive sampling. The results of this study show the contribution of the utilization of assistance funds (PKH) in poverty alleviation in Pesisir Selatan Regency. In the fields of education and health, it has been realized well. The obstacles faced in the utilization of assistance funds (PKH) in Pesisir Selatan Regency, namely the length of time for fund disbursement, hampered Households (KPM) in buying school uniforms for their children, so they borrowed money before the funds were disbursed. The strategy for utilizing assistance funds (PKH) to be more effective is to conduct outreach to KPM and provide a clear understanding so that they understand the objectives of the program as well as the government's monitoring and evaluation of the program.

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2007 yang dicanangkan oleh pemerintah, hingga sampai sekarang. Namun ada terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan diantaranya yakni: penyaluran dana, lamanya pencairan dana, dan tidak semua semua orang miskin mendapat bantuan PKH. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi pemanfaatan dana bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulang kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan; kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dana bantuan (PKH); dan strategi pemanfaatan dana bantuan (PKH) agar lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian ini memperlihatkan kontribusi pemanfaatan dana bantuan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Di bidang pendidikan dan kesehatan sudah terealisasi dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dana bantuan (PKH) di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu lamanya pencairan dana membuat terhambatnya Rumah Tangga (KPM) untuk membeli pakaian sekolah untuk anaknya, sehingga mereka meminjam uang menjelang dana dicairkan. Strategi pemanfaatan dana bantuan (PKH) agar lebih efektif adalah melakukan sosialisasi kepada KPM dan memberikan pemahaman yang jelas sehingga mereka paham akan tujuan dari program serta pengawasan dan evaluasi program dari pemerintah.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Pemanfaatan, Kemanusiaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan bersifat multidimensi, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Kemiskinan juga merupakan ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut Friedman ([Suharto, dkk, 2004:6](#)), basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (perkerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. Kemiskinan bukan semata hanya mengenai rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Kemiskinan sesungguhnya juga bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya ([Suyanto, 2013](#)).

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang relevan untuk terus dikaji. Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam empat kategori. Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Kedua, kemiskinan relative adalah keadaan miskin yang dialami oleh individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp.125.000 per bulan secara absolut tidak miskin. Tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp.200.000 per orang per bulan, maka secara relative orang tersebut termasuk orang miskin. Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai atau orientasi sosial budaya seseorang di masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktural, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka ([Soeharto, 2010:17-18](#)).

Penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap september 2022 dari jumlah 26,36 juta orang. (Badan Pusat Statistik, 2023). Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan. Pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 345,73 ribu orang (5,97 persen), bertambah sebesar 5,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 340,37 ribu orang.

Menghadapi permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah sudah tidak lagi menganggap tabu membahas masalahnya secara terbuka. Tetapi di pihak lain masih belum cukup program-program dan kebijaksanaan yang konkret untuk memerangi kemiskinan. Hal ini disebabkan luasnya wilayah Indonesia yang menunjukkan betapa kondisi kemiskinan begitu beragam, sehingga tidak mudah menyusun program-program dan proyek-proyek penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program/proyek nasional.

Meskipun demikian, Pemerintah telah bertekad melaksanakan proyek-proyek yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan ([Sajogyo, 1996:56](#)).

Upaya menanggulangi kemiskinan pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan seperti: Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (<http://www.pkh.depsos.go.id>).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program yang juga dikenal dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis ([Kemsos RI, 2021](#))

PKH bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. 1) Meningkatkan taraf hidup KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial 4) Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Sasaran atau penerima bantuan PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga: ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan/atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen ([Kemsos RI, 2021](#))

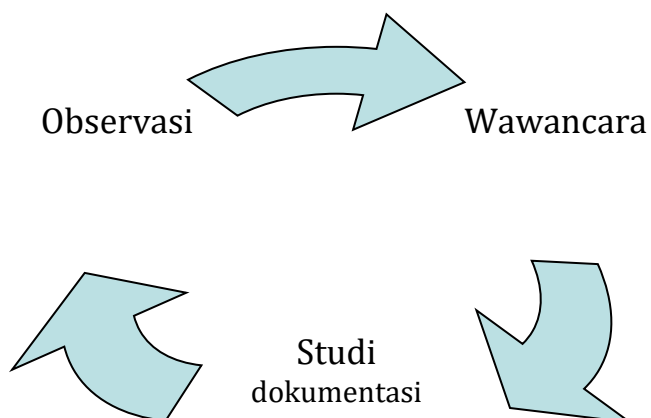
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Data BPS Provinsi Sumatera Barat 2022 memperlihatkan bahwa 33,78 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penduduk miskin termasuk penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti. Program Keluarga Harapan (PKH) ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2007 sampai sekarang dengan jumlah peserta sebanyak 18.641 penerima bantuan pada lima belas kecamatan dan termasuk kecamatan Linggo Sari Baganti salah satu jumlah penerima bantuan PKH terbanyak berjumlah 1672 KPM. Hingga saat ini PKH telah berjalan 17 tahun lebih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi pemanfaatan dana bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulang kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan studi awal penelitian pada tanggal 23 maret sampai 24 Mei 2024 di Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Program Keluarga Harapan dan melakukan wawancara KPM yang mendapat bantuan PKH peneliti mendapatkan bahwa masih terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program PKH ini. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yaitu: (1) penyaluran bantuan dana PKH masih ada tidak tepat sasaran, faktanya masih banyak masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan

dari program PKH sehingga tidak sesuai dengan kriteria calon masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari program PKH yang telah ditentukan sebelumnya, (2) masyarakat merasa lamanya pencairan dana bantuan dari program PKH sedangkan dalam aturan pencairan dana tersebut satu kali dalam tiga bulan, (3) tidak mencakup semua orang miskin yang mendapat bantuan PKH, dan (4) kurangnya koordinasi antara pendamping dengan pemerintah setempat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan penelitian adalah Pendamping PKH di Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Tokoh Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Guru Sekolah Dasar, SMP dan SMA, Kepala Keluarga, ibu rumah tangga miskin penerima dana bantuan. Teknik pemilihan informan dengan cara purposive sampling. Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi data. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulang Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan

Pemanfaatan dalam Meningkatkan Taraf Pendidikan Peserta PKH

Dalam menggunakan dana PKH, peserta PKH pada umumnya menggunakan uang yang diterima hanya 50% untuk keperluan pendidikan selebihnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, ini memperlihatkan kurangnya pemahaman program dari peserta PKH, mereka telah menyalagunakan bantuan dana PKH tersebut. Dana bantuan yang diberikan kepada peserta PKH adalah untuk biaya pendidikan anak mereka bukan untuk biaya keperluan rumah tangga mereka sehari-hari.

Pemamfaatan dalam Meningkatkan Akses dan Kualiatas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Peserta PKH

Akses Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan bagi anak-anak peserta PKH sudah sangat baik, ini terlihat dari kenyamanan dan kepuasan anak-anak dalam belajar, bagi guru tidak ada yang membedakan dalam pelayan antara anak orang yang dengan anak yang tidak mampu, dan dilihat dari minat anak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk sekolah itu sudah jauh

meningkat, ini terlihat dari absensi murid dan jumlah minat anak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat dan juga didukung juga oleh perlengkapan belajarnya.

Akses Pelayanan Kesehatan

Di nagari Punggasan Utara pelayanan kesehatan yang ada hanya di Puskesmas dan Posyandu, peserta PKH selalu melakukan pemeriksaan rutin, baik ibu hamil maupun untuk belita yang melakukan yandu. mulai dari tahun 2020 sampai 2023 kunjungan peserta selalu meningkat. Ini dikarenakan kesadaran dari mereka akan pentingnya kesehatan. Pola pikir yang sudah maju dan rasa cemas terhadap penayakit yang akan menimpa anak-anak mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program PKH di bidang kesehatan sudah terealisasi dengan baik. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka akan semakin peduli terhadap kesehatannya dan akan menciptakan masyarakat yang sejatera yang sesuai dengan tujuan program PKH

Kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesisir Selatan

Lamanya Pencairan Dana Bantuan PKH

Dalam prosedur aturan pencairan dana, pencairan dana dilakukan sekali dalam 3 bulan. Namun ketika peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH mereka mengungkapkan bahwa dana dicairkan tidak selalu sekali dalam 3 bulan namun sering dilaksanakan sekali 4 bulan. lamanya pencairan dana PKH menghambat Ibu KPM untuk menggunakan dana bantuan tersebut, ini dikarenakan rentang waktu pencairan yang lama dan akan menimbulkan kendala pemanfaatan dana bantuan tersebut.

Bantuan Dana Tidak Mencukupi Bagi KPM

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk memenuhi keperluan sekolah anak KPM seperti: membeli pakaian, sepatu, tas dan perlengkapan tulis lainnya, kalau hanya berharap dengan dana bantuan dana PKH itu tidak la cukup tambah lagi terima dana bantuan PKH hanya satu kali dalam 4 bulan

Kurangnya Pengawasan terhadap KPM dalam Menggunakan Dana Bantuan PKH

Bahwa KPM penerima dana bantuan PKH pada umumnya dana bantuan yang mereka terimaitidak 100% digunakan untuk biaya pendidikan dan pemenuhan gizi bayi. Namun digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari bahkan untuk membayar hutang. Kurangnya kontrol atau pengawasan dari pendamping dalam menggunakan dana bantuan PKH, dan tidak berlakunya sanksi-sanksi yang telah disepakati bersama, sehingga KPM dalam menggunakan uangnya tidak tepat pada sasaran yang seharusnya, antara pendamping PKH dengan pemerintah nagari tidak la sejalan atau kurang cocok dan tidak ada koordinasi antara pendamping dengan pemerintah nagari, hal ini akan berdampak buruk terhadap proses kelanjutan dari program PKH

Strategi Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar Lebih Efektif Memberikan Pemahaman Kepada RTSM Mengenai Tujuan PKH

Bahwa KPM yang menyalagunakan dana bantuan tersebut itu dikarenakan RTSM tidak paham dan tahu tujuan dari program, sehingga mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Memberikan Pengawasan terhadap KPM

Bahwa agar program berjalan efektif harus ada pengawasan dari pemerintah, dan bukan hanya sekedar memeberi program bantuan setelah itu melepas begitu saja kepada masyarakat tanpa mengawasi dan evaluasi program tersebut. Seharusnya pemerintah selalu mengawasi program-program yang diberikan kepada masyarakat dan memberlakukan sanksi apabila ada yang menyalagunakan bantuan dana yang diberikan sehingga bisa

tercapai tujuan dari program tersebut.

Menjalin Kerja Sama yang Baik antara Pendamping dengan Pemerintah Nagari

Bahwa harus ada kerja sama yang baik antara pendamping dengan pemerintah nagari untuk mengawasi KPM dalam pemanfaatan dana bantuan, beberapa tahun kebelakang tidak ada koordinasi anatar pendamping dengan pemerintah nagari, ini sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwa antara pendamping dengan pemerintah nagari tidak saling komunikasi bahkan saling menyalahkan sepihak. Jika ini terus terjadi maka apa yang kita inginkan bersama tidak akan tercapai.

Pembahasan

Kontribusi Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulang Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan

Kontribusi pemanfaatan dana bantuan PKH terhadap penanggulang kemiskinan bagi KPM jika dilihat dari segi pendidikan bahwa dari tahun ke tahun minat anak-anak untuk sekolah itu sudah meningkat. Ini sudah terlihat dari absensi murid dan tingkat anak-anak masuk sekolah dari tahun ke tahun yang meningkat. Pola pikir masyarakat miskin yang dahulunya menganggap bahwa sekolah itu hanya menghabiskan uang dan menghabiskan waktu, lebih baik bekerja yang menghasilkan uang. Begitupun di bidang kesehatan masyarakat yang tidak begitu peduli terhadap kesehatannya sendiri dan ketika sakit masyarakat lebih cendrung untuk berobat kepada dukun. Namun setelah pemerintah mengeluarkan program PKH untuk KPM yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan KPM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM, pola pikir KPM telah berubah, KPM lebih memilih menyekolahkan anaknya dan menjaga kesehatan anak-anaknya.

Sesuai dengan mamfaat PKH akan memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PKH akan memberikan income effect kepada RTSM/KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) serta memberikan kepastian pada si anak akan masa depannya (insurance effect). (Kementerian Sosial RI.2021).

KPM merasa dengan adanya program PKH sangat membantu mereka dalam menyekolahkan anak-anaknya. KPM tidak lagi memikirkan biaya yang besar untuk pendidikan. Karena KPM diberikan dana bantuan tunai untuk keperluan pendidikan anak mereka. Begitupun di bidang kesehatan KPM di haruskan membawa anak-anak mereka untuk berobat ke puskesmas tanpa ada mengeluarkan biaya. KPM diberikan pelayan yang baik untuk berobat, sehingga KPM tdiak lagi mau berobat ke dukun namun lebih memilih untuk ke puskesmas, sehingga tingkat kunjungan KPM untuk berobat ke puskesmas dari tahun ke tahun jauh meningkat. Jika diliaht dari tujuan PKH dari bidang pendidikan dan bidang kesehatan sudah teralisasi dengan baik.

Adapun sebagian KPM yang menyalagunakan dana bantuan PKH dalam memanfaakannya ini dikarenakan berbagai hal diantaranya: tidak adanya pengecekan yang dilakukan oleh pendamping terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada KPM dan keadaan KPM pada saat mendapatkan dana bantuan PKH mereka membutuhkan uang tersebut untuk keperluan untuk membayar hutang, tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti beli beras dan keperluan sehari-hari yang lain.

Program keluarga harapan adalah salah satu program untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Panjaitan (2000:7) Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan di sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan, atau dengan kata lain miskin relatif ini adalah miskin secara psikologis. Sebenarnya secara ekonomi ia mampu, namun sering mengaku miskin, salah satu penyebabnya adalah karena ia punya tagihan hutang yang banyak. ([Setiadi, 2011:789](#)). Sikap dan perilaku dari RTSM yang menyalagunakan dana bantuan PKH diakibatkan oleh budaya RTSM itu sendiri dimana mereka malas untuk bekerja dan boros hanya tergantung dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Bila dianalisis menggunakan bentuk kemiskinan Nugroho (2004: 166) kemiskinan mereka termasuk ke dalam kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesisir Selatan

Lamanya pencairan dana bantuan PKH

Dalam buku pedoman program keluarga harapan tahun 2021 menjelaskan bahwa pencairan dana PKH dilakukan dalam waktu 1 kali dalam 3 bulan, namun temuan di lapangan pencairan dana bantuan PKH terjadi dalam 1 kali dalam 4 bulan. Lamanya pencairan dana tersebut membuat KPM tidak efektif dalam menggunakan uang bantuan tersebut. Struktur yang membuat seseorang untuk tidak bisa keluar dari kemiskinan. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin". ([BPS, 2014: 5](#)).

Bantuan dana tidak mencukupi bagi KPM

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa dana bantuan PKH yang diterima oleh RTSM tidak mencukupi dalam membeli perlengkapan sekolah anak mereka. Ini dikarenakan antara jumlah bantuan yang mereka terima tidak sebanding dengan harga perlengkapan sekolah yang semakin mahal, sehingga mereka sering mengeluh dengan jumlah bantuan mereka terima. KPM berharap kepada pemerintah untuk menambah jumlah dana bantuan PKH yang mereka terima. Dari temuan tersebut terlihat bahwa perilaku KPM yang hanya berharap bantuan pemerintah, rasa malas dan tidak ada keinginan untuk berkerja keras.

Perilaku yang ditampakkan oleh individu-individu dari rumah tangga miskin merupakan wujud parsial dari apa yang disebut dengan kebudayaan kemiskinan. Menurut Oscar Lewis kebudayaan kemiskinan bukanlah sekedar upaya penyesuaian diri orang miskin terhadap struktur sistem sosial yang berlaku normatif di masyarakat tapi merupakan wujud dari sikap mental yang telah lestari dalam diri mereka. Sikap mental tersebut tumbuh dan terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya pada anak-anak. Kebudayaan kemiskinan ini berkembang tak terkontrol dalam perkotaan modern ([Suparlan, 1984:32](#)).

Teori yang dikemukakan oleh Oscar Lewis ini juga ditegaskan oleh Weber. Weber menyatakan bahwa kemiskinan bermula dari karakteristik orang miskin itu sendiri. Orang miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki

jiwa wiraswata, fatalistic, dan tidak ada hasrat untuk berprestasi. Orang miskin karena memiliki budaya kemiskinan yang mencakup karakteristik, psikologis, sosial dan ekonomi. Pandangan konservatif memandang dan melihat bahwa program-program pemerintah mengubah sikap mental masyarakat miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pemerintah ([Suharto, 1995:140](#)).

Kurangnya pengawasan terhadap KPM dalam menggunakan dana bantuan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa KPM penerima dana bantuan PKH pada umumnya dana bantuan yang mereka terima tidaklah 100% digunakan untuk biaya pendidikan dan pemenuhan gizi bayi. Dana bantuan sebagian digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari bahkan untuk membayar hutang. Disini terlihat kurangnya kontrol atau pengawasan dari pendamping kepada KPM dalam menggunakan dana bantuan PKH, dan tidak berlakunya sanksi-sanksi yang telah disepakati bersama, sehingga KPM dalam menggunakan uangnya tidak tepat pada sasaran yang seharusnya, ini juga dipengaruhi oleh faktor individu dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ingin merubah nasibnya sendiri.

Dengan kontrol sosial dalam arti yang luas dimaksud setiap usaha atau tindakan dari seseorang atau suatu pihak untuk mengatur kelakuan-kelakuan orang lain. ([Nasution, 1999: 17](#)). Oleh sebab kelakuan manusia senantiasa berlangsung dalam interaksi dengan orang lain maka sebenarnya semua kelakuan dipengaruhi atau dikontrol oleh interaksi itu. Selanjutnya pengamatan peneliti di lapangan bahwa terlihat antara pendamping PKH dengan pemerintah nagari tidaklah sejalan atau kurang cocok dan tidak ada koordinasi antara pendamping dengan pemerintah nagari, hal ini akan berdampak buruk terhadap proses kelanjutan dari program PKH.

Strategi Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar Lebih Efektif Memberikan Pemahaman Kepada KPM mengenai Tujuan PKH

Sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial disebut sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan dalam berbagai kelompok khusus. ([Nasution, 1999:126](#)). Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan mengenai strategi pemanfaatan dana bantuan bagi KPM agar lebih efektif, yang pertama sekali adalah melakukan sosialisasi kepada KPM dan memberikan pemahaman yang jelas sehingga mereka paham akan tujuan dari program yang diberikan. Pada saat ini KPM yang menyalagunakan dana bantuan tersebut itu dikarenakan KPM tidak paham dan tahu tujuan dari program, sehingga mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Memberikan Pengawasan terhadap KPM

Kontrol sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku ([Soerjono, 2010: 179](#)). Program yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi keiskinan sudah banyak dan salah satunya adalah program PKH, apapun bentuk program bantuan yang diberikan kepada KPM tanpa ada pengawasan semua tidak ada gunanya. Berdasarkan temuan di lapangan mengenai strategi pemanfaatan dana bantuan bagi KPM agar lebih efektif, menjelaskan bahwa agar program berjalan efektif harus ada pengawasan dari pemerintah, dan bukan hanya sekedar memberi program bantuan setelah itu melepas begitu saja kepada masyarakat tanpa mengawasi dan evaluasi program tersebut. Seharusnya pemerintah selalu mengawasi program-program yang diberikan kepada masyarakat dan memberlakukan sanksi apabila ada yang menyalagunakan

bantuan dana yang diberikan sehingga bisa tercapai tujuan dari program tersebut.

Menjalin Kerja Sama yang Baik antara Pendamping dengan Pemerintah Nagari

Untuk mencapai tujuan dari program semua pihak harus berkerja sama, berdasarkan temuan dilapangan mengenai strategi pemamfaatan dana bantuan bagi KPM agar lebih efektif, mengungkapkan bahwa harus ada kerja sama yang baik antara pendamping dengan pemerintah nagari untuk mengawasi KPM dalam pemanfaatan dana bantuan, beberapa tahun kebelakang tidak ada koordinasi antara pendamping dengan pemerintah nagari, ini sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwa antara pendamping dengan pemerintah nagari tidak saling komunikasi bahkan saling menyalahkan sepihak. Jika ini terus terjadi maka apa yang kita inginkan bersama tidak akan tercapai. Leopold Von Wiese dan Howard Becker ([Soerjono, 2010: 173](#)) melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Temuan penelitian ini dikaitkan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Struktural fungsional merupakan suatu teori yang mengkaji tentang unsur-unsur atauelemen-elemen yang ada didalam masyarakat sesuai dengan sistemnya masing-masing. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang yang merupakan tanggungjawab suatu peran. Paul Johnson Doyle (1981: 130) menyatakan bahwa struktural fungsional Talcott Parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua system yang harus dipenuhi oleh system sosial dikenal dengan skema AGIL, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment, Integration, Latten pattern. Keempat sistem AGIL tersebut, merupakan kerangka untuk menganalisis system tindakan sosial. Sehingga merangsang penyesuaian diri dari suatu tujuan serta semangat dorong yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Penyampaian tujuan tersebut, maka harus ada suatu tahap penyesuaian terhadap suatu situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu, perlu adanya solidaritas dalam kehidupan sosial atau integration. Pelaksanaan tugas akan tercapai, jika adanya disiplin setiap anggota masyarakat dan bergerak maju untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga setiap anggota masyarakat dapat mempertahankan keadaan yang terjadi.

Keempat fungsi tersebut, tidak saja melihat pada suatu kondisi dan dinamika-dinamika kelompok kecil, melainkan dimensi fundamental dalam ruang tidakan. Maka sistem AGIL bertujuan untuk menjelaskan, bahwa dalam masyarakat mempunyai fungsi yang saling berkaitan dan menjalankan tugas masing-masing yang sesuai dengan peran status. Jadi jika semua unsur atau elemen-elemen yang ada dalam masyarakat menjalankan fungsinya dan berkerja sama dengan baik maka tujuan akan tercapai.

KESIMPULAN

Kontribusi pemanfaatan dana bantuan Program keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggungulag kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, Jika dilihat dari segi pendidikan bahwa dari tahun ke tahun minat anak-anak untuk sekolah itu sudah meningkat. Ini sudah terlihat dari absensi murid dan tingkat minat anak-anak masuk sekolah dari tahun ke tahun yang meningkat. Begitupun di bidang kesehatan, bahwasanya terlihat kunjungan KPM dari tahun ke tahun untuk berobat ke puskesmas jauh meningkat Jika diliaht dari tujuan PKH dari bidang pendidikan dan bidang kesehatan sudah teralisasi dengan baik. Adapun sebagian KPM yang menyalagunakan dana bantuan PKH dalam memanfaakannya ini dikarenakan berbagai hal diantaranya: tidak adanya pengecekan yang dilakukan oleh

pendamping terhadap penggunaan dana yang diberikan kepada KPM dan keadaan KPM pada saat mendapatkan dana bantuan PKH mereka membutuhkan uang tersebut untuk keperluan untuk membayar hutang, tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti beli beras dan keperluan sehari-hari yang lain. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat beberapa kendala pertama, lamanya pencairan dana bantuan PKH, kedua bantuan dana tidak mencukupi bagi KPM, ketiga kurangnya pengawasan terhadap PKM dalam menggunakan dana bantuan PKH. Strategi pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih efektif, ada beberapa strategi agar pemanfaatan dana bantuan PKH lebih efektif. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada KPM mengenai tujuan PKH, kedua memberikan pengawasan terhadap KPM, ketiga menjalin kerja sama yang baik antara pendamping dengan pemerintah nagari.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2024. Profil Kemiskinan di Indonesia (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen.html>)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2024. (<https://sumbar.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1309/persentase-penduduk-miskin-di-sumatera-barat-pada-maret-2024-sebesar-5-97-persen.html>)
- Cakrawijaya, Amin, Muhammad, dkk. 2014. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Artikel* diterbitkan. *Artikel Perencanaan Wilayah dan Kota*. Universitas Diponegoro.
- Ghofur, A. (2019). Analisis Dampak Pemanfaatan Dana PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Praja Lamongan*, 2(2), 47-55.
- Johnson, Doyle Paul. 1981. Teori Sosologi Klasik dan Moderen (Di Indonesiakan Oleh: Robert. M.Z Lawang Jilid1). Jakarta: PT. Gramedia.
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81-89. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>
- Hidayat, Budi, dkk. 2011. Program Keluarga Harapan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Preventif. *Artikel* diterbitkan. *Artikel Kesehatan Masyarakat Nasional*. FKM Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v5i5.130>
- Kementerian Sosial RI. 2021. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Marnah, M., Husaini, H., & Ilmi, B. (2017). Analisis perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Paminggir. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 1(2), 130-138. <http://dx.doi.org/10.20527/jbk.v1i2.3152>
- Nasution, S. 1999. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Nuryanti, N. (2019). Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan untuk Menyukkseskan Wajib Belajar XII Tahun di Kecamatan Pusako Siak. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 2(1), 26-31.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23514>
- Okfelina, A. (2021). *Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lauke*

- Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/>
- Panjaitan, Merphin. 2000. *Memberdayakan kaum miskin*. Jakarta: Gramedia
- Priyantiningtiyas, Lailia. 2014. "Evaluasi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tahun 2013" *Tesis* diterbitkan. Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Purwanto, Agus, Slamet, dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Artikel* diterbitkan. Program Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- Putri, Depi. 2014. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbul harjo Kota Yogyakarta" *Tesis*. Program Pascasarjana Konsentrasi Pekerjaan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rozi, Akhmad. 2011. Implementasi Program Keluarga Harapan di kabupaten Tanah laut. *Tesis* diterbitkan. Program Magister Sains Administrasi Pembangunan UNLAM.
- Sunardi, R. A., Rahayu, U. P., Saputri, M. O., & Ramdhani, Q. M. (2023). Pelatihan Pemanfaatan Daun Singkong Menjadi Dendeng Bagi Kelompok Penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 32-36. <https://mediacendekia.my.id/ojs/index.php/jpmi/article/view/7>
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group
- Setiyowati, L. (2023). Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Tahun 2022 oleh Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29278-29289. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11685>
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- GUNAWAN, P. V. (2022). PERAN KELUARGA DALAM PEMANFAATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI LANJUT USIA.
- Sugiana, Meilita, Puji. 2012. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan. *Tesis* diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Kebijakan Publik UI Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Sajogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, Profesi Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*. Jakarta: Raja Wali Pers. <http://digilib.unisayogya.ac.id/id/eprint/6270>
- Zulfiqar, E., & Ritonga, S. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 162-164.

Copyright holder:

© Ekardo, A. Putri. E. D., Sari, I., T., Ramadhani.

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA